

PERAN STRATEGI PERS DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

Tarman Azzam*)

Krisis moneter yang menerpa Indonesia tahun 1997 berkembang menjadi krisis multidimensi, menyebabkan meletusnya era reformasi dengan runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, ditandai mundurnya Presiden Soeharto diganti Wapres B. J. Habibie menjadi Presiden RI ketiga. Krisis itu terutama tahun 1997-1999, pusaran awal era reformasi. Ketahanan Nasional saat itu pada titik nadir, nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam taruhan tetap berdiri atau ambruk sebagai nation state. Saat itu berbagai demonstrasi meletus, mencaci-maki rezim berkuasa, menghujat Orde Baru yang gagal memakmurkan rakyat, menuntut segera diatasinya krisis dan ditegakkannya hukum yang keras atas para koruptor. Pemerintah pun limbung, tidak mampu memenuhi rakyat, tidak berdaya merespons perubahan zaman, dan gagal mengatasi krisis. Akibatnya masyarakat kian kecewa dan frustrasi, maka meletuslah kemarahan yang menimbulkan chaos dan anarchy. Semua kejadian itu diliput lengkap oleh pers, tanpa tedheng aling-aling, berani dan gamblang, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama demi memenuhi hak rakyat untuk tahu (the people's right to know). Peranan pers sangat penting dan strategis dalam memperkuat Ketahanan Nasional. Ada korelasi yang sinergi dan konvergensi antara pers dan Ketahanan Nasional dalam memperkuat dan memakmurkan kepentingan nasional, dan akan membimbing negara bangsa dalam mencapai ketahanan nasional yang tangguh.

Secara universal dipahami pers merupakan elemen penting demokrasi. Tidak ada demokrasi dalam negara yang tidak

menghormati kebebasan pers, sebab pers indikator utama negara demokrasi. Pers berjuang memberdayakan (*empowering*)

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

pemerintah dan masyarakat demi memperkuat ketahanan nasional, agar negara bangsa kokoh, kuat, maju dan makmur. Pers menyajikan informasi benar, aktual dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah, terutama sebagai upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa dengan melayani hak rakyat untuk tahu (*the people's right to know*). Untuk itu, pers menjalankan fungsi informasi, edukasi, kontrol sosial, dan hiburan, antara lain dengan menyebarluaskan informasi, melakukan pendidikan politik bagi rakyat, dan bersikap kritis terhadap jalannya pemerintah.

Untuk lebih memahami dan mendalami persoalan pers, penting mengetahui kondisi objektif pers, potensi dan kekuatannya, serta bagaimana pers mengantisipasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Secara simultan kajian tentang pers juga diarahkan untuk mengenal sistem pers, bagaimana negara menyikapi pers bebas. Pada era Reformasi tidak boleh intervensi luar atas pers, termasuk dari pemerintah, semata-mata agar pers mampu bersikap mandiri, intelek dan dewasa demi pengabdian kepada Indonesia. Realitas mutakhir, pers berada di tengah *conflict of interest* antara orientasi bisnis dan idealis, timbul pertanyaan

sejauh mana semangat nasionalisme dan patriotisme pers nasional.

Kuatnya pemahaman atas pers akan mengantar ke pemikiran *komprehensif* dan *integral* dalam menganalisa korelasi pers dan ketahanan nasional, bagaimana sinergi dan konvergensi pers dan negara sehingga memudahkan pengkajian problem aktual ketahanan nasional. *Sinergi* dimaknai kemampuan bekerjasama, searah, sejalan dan beriringan. *Konvergensi* bermakna keterikatan kuat, saling bermanfaat, menyatu dan terintegrasi antar komponen dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Dalam hal ini, konvergensi pers dan ketahanan nasional dimaknai keterikatan yang saling menguat, erat dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi negara-bangsa. Hal itu penting difahami, pers nasional adalah elemen negara-bangsa. Untuk itu jangan heran jika pers nasional suatu negara selalu membelak kepentingan nasionalnya.

Kondisi Objektif Pers Nasional

Pers Indonesia pada awal era Reformasi, tahun 1997-1999, merupakan paling bebas di Asia, namun tidak sama bebas dengan negara-negara demokrasi maju dan makmur. Liputan pers yang sangat bebas itu sejalan dengan

euphoria masyarakat. Kebebasan itu dituding sebagian pihak sebagai pers telah kebablasan. Namun gradasi kebebasan itu kemudian menyurut karena berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), termasuk akibat masih kuatnya feodalisme, otoritarianisme, buruknya kepastian hukum, dan belum terwujudnya kultur demokrasi yang sehat. Menurut Rosihan Anwar, Indonesia tidak mengenal tradisi kebebasan pers sudah sejak masa kolonial Belanda. Hal itu sejak lahirnya *Regerings Reglement 1854* disusul berbagai peraturan sensor lainnya.

Sebenarnya liputan pers pada awal Reformasi wajar-wajar saja, apalagi situasi dan kondisi rakyat ketika itu dilanda suasana *euphoria*. Publik geram karena merasa diperlakukan tidak adil. Mereka garang menumpahkan *uneg-uneg* yang terpendam lebih 40 tahun. Publik, termasuk pers, sangat *frustrasi* akibat negara lebih 52 tahun merdeka tidak berhasil memakmurkan rakyat, gagal mengatasi krisis multidimensi. Peristiwa awal reformasi kondisinya luar biasa, lebih dari sekedar *reformasi* atau *restorasi*, tak obahnya *revolusi*. Karena itu liputan pers jauh berbeda dari kondisi normal. Ketika itu, rakyat marah, maka lembaga kepresidenan dihujat, parlemen

dan lembaga yudikatif dimakimaki, ABRI (TNI-Polri) *diobok-obok* oleh berbagai demonstrasi, pemerintah tidak berdaya, parpol – PDI, PPP dan Golkar – dikecam habis-habisan, organisasi profesi dan lainnya tidak luput dihajar massa rakyat. Semua itu tanpa kecuali diliput secara luas dan lugas oleh pers. Belakangan, UUD 1945 juga diubah MPR dengan istilah ‘amandemen’. Di berbagai daerah meletus sikap *mbalelo* menuntut keadilan, seperti menuntut bagi hasil eksploitasi sumber daya alam dan menuntut pemekaran daerah dengan hak otonomi yang lebih besar. Desakan juga muncul dari berbagai etnis, komunitas, golongan, kelompok, kaum profesional, tokoh masyarakat, individu, dan sebagainya. Situasi dan kondisi itu mengubah, paling tidak menggeser nilai-nilai dan karakter masyarakat menjadi lebih *brangasan*, tidak sabaran, bahkan timbul berbagai konflik vertikal dan horizontal.

Publik mendesak pers menyiarkan semua peristiwa, aspirasi dan tuntutan apa adanya, untuk itu pers harus bebas. Pada awal Reformasi, pemerintah tidak berdaya dan hanya pasrah menghadapi situasi abnormal. Deppen RI tak berdaya menghadapi perubahan *de-facto* kehidupan pers. Terjadi *chaos* dan

anarchy pada Mei 1998, Presiden Soeharto berhenti digantikan Wapres Habibie. Namun pers dituding telah kebablasan, karena dituduh merusak, menghasut, memanasi situasi, mengadu domba dan memojokkan pemerintah. Sebenarnya sikap pers kadang *nyeleneh* merupakan karakter universal pers. Napoleon Banaparte (Malik at al, 1993 : 21) mengakuinya,

“Wartawan itu cerewet, pengecam, penasihat, pengawas, penguasa dan guru bangsa. Empat surat kabar di Paris jika memusuhi, lebih aku takuti daripada seribu bayonet.”

Namun, pers juga tidak lepas dari kesalahan, terutama oleh media partisan, karena tidak sedikit berita tanpa pertimbangan mendalam disiarkan begitu saja ke publik. Tokoh pers, Rosihan Anwar (2006 : 27) menyatakan,

“Dalam kurun zaman yang disebut era reformasi, bukan perbaikan dan kemajuan yang tampak pada media massa komunikasi, malah muncul gejala erosi moralitas, pelecehan etika, pengabaian norma-norma dan nilai-nilai agama, pelanggaran kode etik jurnalistik, pengrusakan bahasa, penyebaran pornografi dan vulgarisme”.

Untuk lebih memahami kondisi objektif pers era Reformasi, Dewan Pers (2008 : 78) mencatat persepsi publik 54% menilai pers bebas memilih dan memberitakan peristiwa tanpa tekanan pihak manapun, 63% merasakan

manfaat penting kebebasan pers dan menolak tudingan pers telah kebablasan, tetapi 26% menduding pers sudah kebablasan. Mayoritas menilai pers telah bebas dari pengaruh dan tekanan pemerintah maupun pengusaha, dan mereka menolak tindakan sensor dan pembredelan terhadap pers. Siregar (Ibid: 87) menganggap tudingan atas pers telah kebablasan itu sebagai angka yang cukup besar, apalagi jika terdiri dari kalangan menengah ke atas yang dapat menciptakan opini publik. Atas adanya keinginan sebagian politisi DPR dan pemerintah yang ingin merevisi atau mengamandemen UU Pers agar Dewan Pers berwenang lebih tegas, Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal (2008:ix) menegaskan:

“Kecuali ada jaminan bahwa revisi atau amandemen itu dapat lebih menjamin kemerdekaan pers, Dewan Pers secara tegas menyatakan menolak usulan amandemen UU Pers.”

Kerusuhan Mei 1998 berupa Peristiwa Trisakti dan Peristiwa Semanggi I dan II menewaskan dan menciderai banyak orang terutama mahasiswa, menimbulkan huru-hara, penjarahan, perampokan, menghanguskan banyak gedung pemerintah, swasta, rumah pribadi, pusat-pusat belanja, dan porak-porandanya berbagai fasilitas umum. Semua itu diliput pers, mencerminkan

euphoria publik. Kerusuhan itu bukan dipicu pers, tapi akibat luapan emosi publik yang tertahan lama dan membludak pecah. Liputan lugas itu juga dilakukan media milik keluarga Presiden Soeharto, maupun media yang dibiayai negara seperti RRI, TVRI dan LKBN Antara.

Pada awal era Reformasi terjadi penyederhanaan proses SIUPP, Deppen RI melahirkan 1.687 SIUPP baru. Dari jumlah itu, Dewan Pers (2001) menemukan penerbitan yang pernah terbit 1.381 (81,7%), lainnya tidak pernah terbit. Dicatat:

“Selama tahun 1999 dari jumlah 1.381 penerbitan itu, sebagian besar hanya dapat terbit dalam beberapa edisi. Sebanyak 830 penerbitan berhenti terbit pada tahun 1999. Dengan demikian penerbitan yang tercatat tetap aktif terbit pada tahun 1999 hanyalah 551 penerbitan”.

Dengan penerbitan pers akhir Orde Baru 296 SIUPP, seharusnya pada tahun 1998-1999 beredar 1.983 media cetak, namun hanya 551 penerbitan tetap aktif terbit. Tidak sampai separoh dari jumlah itu yang sehat, selebihnya megap-megap mirip bunyi pepatah “*seperti kerakap di atas batu, hidup enggan mati tak mau*”.

Pada awal Reformasi, pers kacau balau akibat banyaknya orang yang mengaku sebagai wartawan, tidak jelas identitas.

Wartawan liar itu beroperasi sekenanya, ada yang wartawan tanpa surat kabar (WTS) karena memang bukan wartawan, namun mereka beroperasi liar dalam masyarakat yang lagi resah. Lebih *runyam* karena beredarnya banyak penerbitan liar, non-pers, merusak citra pers. Ada yang bahasanya *vulgar*, menabrak hukum dan etika, hanya untuk memfitnah, menghantam musuh politik, menghajar lawan bisnis, dan untuk balas dendam. Ketika itu, aparat penegak hukum sulit mengejar media liar karena tidak jelas penerbit dan pengelolanya.

Indonesia telah menerapkan semua sistem pers, terakhir ini sistem liberal, namun praktek pers bebas sebenarnya telah berlangsung sejak akhir era Soeharto, dengan terjadinya *lawless* (tidak berjalannya hukum) dalam kehidupan pers sejak 1997. Pada akhir Orde Baru ada 296 media cetak menjadi lebih 2.000, namun yang bertahan dibawah 1.000 media pers. Radio menjadi lebih 2.000 stasiun, media TV juga maju pesat yang mulanya hanya 6 stasiun nasional menjadi hampir 200 stasiun dengan sedikitnya ada 12 TV nasional (anggota ATVSI) dan lebih 150 TV lokal (anggota ATVLI). Juga, pers diperkaya kehadiran multimedia *on-line*.

Presiden Habibie ketika mem-

buca Kongres-XX PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Semarang, 10 Oktober 1998, menegaskan,

“Tidak ada demokrasi di negara manapun juga di dunia tanpa adanya kemerdekaan pers. Keputusan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita sepenuhnya ditangan pers sendiri. Pemerintah tidak akan mengarahkan memberi petunjuk, menelpon redaksi media massa tentang suatu berita mana harus disiarkan atau tidak disiarkan” (Kompas, 1998:1).

Kekuatan utama pers pada kemampuan menjangkau banyak orang, melampaui segala batas, mempengaruhi pikiran individu dan masyarakat, membentuk pendapat umum (*public opinion*). Kekuatan pers dapat menciptakan kebiasaan baru masyarakat menjadi kebiasaan normal, dan dapat berkembang menjadi budaya.

Freedom House, sebuah lembaga non-profit yang didirikan Wendell Willkie dan Eleanor Roosevelt tahun 1941, mengumumkan hasil risetnya tahun 2009 tentang kebebasan pers di semua negara bangsa, dalam mana Indonesia berada pada peringkat ke-42, lebih baik daripada Malaysia (53) dan Singapura (57). Kebebasan pers di Indonesia tahun 2009 masuk katagori lumayan dengan Rating 54 dalam range 31-60, berarti cukup bebas. Malaysia dan Singapura

masing-masing Rating 65 dan 69 dalam range 61-100, katagori *Not Free* (tidak bebas), karena pers negara tetangga itu diawasi ketat pemerintah dan berada di bawah tekanan. Dari riset itu tercatat 113 negara yang kebebasan pers lebih baik dibandingkan Indonesia, dari total 191 negara yang diteliti (Business News, 2009: 1-2).

Agar peranan strategis pers mampu memperkuat ketahanan nasional, maka seluruh praktisi pers dengan dukungan pemerintah dan masyarakat harus membenahi diri demi mengelola kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi dengan paradigma Kemerdekaan Pers yang Profesional. Kesediaan membenahi diri sangat bermanfaat bukan hanya bagi pers, melainkan demi kepentingan nasional, berarti pers reformasi harus kontinyu berdisiplin mereformasi diri, termasuk memperbaiki mutu kebebasan agar benar-benar berguna bagi negara bangsa. Jika komunitas pers tidak membenahi diri secara sukarela, niscaya akan muncul sikap antipati atas kebebasan pers, berarti terjadi kondisi yang kontra produktif bagi pers nasional, dan bisa saja timbul arus balik pembenahan pers harus dilakukan oleh pihak luar pers. Jika itu yang terjadi, tentu akan merugikan pers dan lainnya. Untuk itu, Indonesia perlu

belajar dari bangsa-bangsa maju, tidak hanya dari sukses dunia Barat, melainkan misalnya sangat tepat belajar dari Jepang yang menganut sistem pers liberal tanpa tercerabut dari akar budaya, tradisi dan peradaban Dai Nippon. Hal mendesak untuk dibenahi, terutama oleh komunitas pers sendiri adalah penegasan jaminan konstitusi atas kebebasan pers. Di lain pihak pers, publik dan pemerintah harus sama hormat kepada kebebasan pers. Untuk itu pers harus pro-rakyat, taat hukum dan etika profesi, dan konsisten melakukan *innercontrol*, serta siap dikontrol oleh publik dan pemerintah. Dalam keadaan demikian harus tidak ada kriminalisasi pers. Juga harus dilaksanakan standarisasi kompetensi, organisasi dan media dengan peningkatan profesionalisme pers, dan penegakan prinsip-prinsip universal kebebasan pers. Intinya, bagaimana agar terbangun kuat budaya kebebasan pers yang profesional, idealis dan independen berlandaskan semangat nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Kini cukup kuat keinginan komunitas pers membenahi diri.

Perspektif Ketahanan Nasional

Pada awal Reformasi, ketahanan nasional sangat rapuh, berada pada titik nadir, yang

menentukan nasib NKRI terus bertahan atau bubar. Diplomasi susah dilakukan akibat tertekan dinamika domestik yang memburuk. Terjadi *leadershipless*, gancang ideologi nasional akibat merosot penghormatan atas Pancasila (*ideologyless*), krisis politik, pemerintah tak berdaya meredam gejolak sosial, ketertiban dan keamanan terganggu, meletus berbagai konflik mirip tanpa pemerintahan (*governmentless*), keadaan *amburadul* seolah tak ada hukum (*lawless*). Muncul banyak media partisan dan media non-pers yang merusak citra pers. Ketika itu Timtim lepas hasil kebijakan Habibie yang keliru mengadakan referendum bagi rakyat Timor Timur. Kejadian itu pukulan telak bagi Indonesia, terasa betapa lemahnya ketahanan nasional, padahal NKRI negara besar, berpenduduk besar, wilayah luas, alamnya indah dan kaya raya.

Sejarah membuktikan tak ada negara abadi (*permanent state*), selalu berubah, ada yang rontok, sekuat apapun menguasai peradaban, pemimpin yang bertahata, rezim pemerintah, golongan yang berkuasa, dan tingkat budaya yang maju. Babylonia rontok, juga Persia, Mesir kuno dan Yunani kuno. Kerajaan Indian Aztek dengan budaya Inca hancur, Imperium Romawi hanya 10 abad, Mongol musnah, Mogul

India, Raja-raja Cina, demikian pula Uni Soviet, Yugoslavia, dan lainnya.

Untuk menjadikan negara tangguh, langgeng dan sejahtera diperlukan kuat dan kokohnya ketahanan nasional. Pokja Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas RI (2003: 9) merumuskan Ketahanan Nasional:

'...adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya''.

Amerika Serikat, negara kampiun demokrasi yang kapitalis dan liberalis, pernah gempar tahun 1972 akibat terbongkarnya kasus *Pentagon Papers*, dan juga skandal *Watergate*, yang menjatuhkan Presiden Nixon (Basuki, 1995). *Pentagon Papers* adalah dokumen rahasia Departemen Pertahanan AS (Pentagon) memuat kebijakan Pemerintah AS tentang kelanjutan Perang Vietnam. *The New York Times* membeberkan dokumen itu, saat masyarakat sedang dalam puncak kemarahan atas keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Jaksa Agung AS minta

pengadilan melarang penyiaran dokumen itu, karena menyangkut rahasia negara, tapi Pengadilan Federal Washington DC memenangkan pers, dan Pengadilan Distric New York membolehkan *Pentagon Papers* tetap dipublikasikan demi kepentingan rakyat Amerika. Pengadilan menyatakan rakyat Amerika berhak tahu isi dokumen itu, agar tahu kebijakan Pemerintah AS atas Perang Vietnam yang telah menewaskan banyak tentara Amerika.

Skandal *Watergate* adalah kasus penyadapan telepon atas Markas Besar Partai Demokrat oleh 'oknum' Partai Republik yang dekat dengan Presiden Nixon, sehingga yang terlibat populer disebut *All the President's Man*. Ketika itu Nixon ingin kembali menjadi Presiden AS pada Pemilu 1972. Caranya, strategi rahasia Partai Demokrat harus dipatahkan dengan menyadap telepon *Headquarter's Democrat Party*. Nixon menang mutlak (*landslide*), kembali menjadi Presiden AS periode 1973-1977, tapi segera dihantam krisis *Watergate* yang menjatuhkannya karena terkait persoalan moral politik dan melakukan kebohongan publik. Keberanian *investigative reporting* itu telah menyumbangkan semangat baru dalam penerapan kebebasan pers, memperkuat demokrasi, transparan-

si dan akuntabilitas, mengokohkan ketahanan nasional AS.

Kasus itu menunjukkan erat korelasi negara dan rakyat, karena itu pemerintah tidak boleh hanya melakukan *silent policy*, apalagi berbohong merugikan rakyat. Kasus itu menunjukkan betapa erat hubungan pers dan rakyat, saling membela dalam menghadapi pemerintah yang tak amanah, yang merugikan rakyat dan negara, betapa kuatnya korelasi kebebasan pers dan ketahanan nasional, apalagi di negara-negara demokratis yang maju dan makmur. Ketahanan nasional tangguh jika publik tidak dibohongi dan moral politik dihormati. Kasus itu membuktikan jatuhnya rezim pemerintah tidak menghancurkan *nation state*. Malahan kejatuhan rezim yang tidak jujur, korup dan zalim akan membersihkan segala anasir busuk di seputar rezim pemerintah yang menggerogoti negara. Selanjutnya melalui gegap gempita rakyat akan terjadi proses perbaikan negara, walaupun tidak selalu mulus.

Banyak kasus dalam sejarah menunjukkan, tumbangnya pemerintah tak berarti negara tumbang. Revolusi Perancis 1789, menghapuskan monarkhi absolut, berdirilah Republik Perancis. Perancis tetap ada sebagai negara-bangsa, kuat, maju dan makmur hingga kini. Sejarah menun-

jukan banyak kasus pemimpin dihukum rakyat karena berlaku zalim dan tidak amanah. Diktator Adolf Hitler musnah, tetapi Jerman tetap berdiri, begitu pula kekuasaan Mussolini tumbang, Italia kini menjadi negara maju dan makmur. Di Korea Selatan, para petinggi dihukum penjara karena bersalah, seperti Presiden Chun Doo Hwan dan Presiden Roh Tae Woo, juga Presiden Alberto Fujimori di Peru, Presiden Ferdinand Marcos terusir dari Philipina, Presiden Pakistan Zulfikar Ali Butho dihukum gantung, Syah Iran Mohammad Reza Pahlevi tersingkir ke Mesir diganti rezim Mullah dalam *nation state* Persia. Presiden Uganda Idi Amin Dada ditumbangkan, Raja Idris terpaksa meninggalkan Libya yang dikuasai Muammar Khaddafi, berbagai rezim pemerintah bangun jatuh di Bangladesh, dan Mao Tse Dong wafat diganti penguasa lainnya di Cina Daratan yang menjadikan RRC kian kuat dan tangguh. Presiden Nicolai Ceauscesco dihukum mati revolusi rakyat, tapi Rumania tetap berdiri. Semua itu menunjukkan nasib rezim penguasa tidak identik dengan nasib *nation state*, karena negara-bangsa akan tetap ada sekalipun penguasa berganti.

Kini, dunia tidak dapat mengelak dari pengaruh globalisasi

yang melanda kehidupan universal akibat kemajuan pesat teknologi, terutama teknologi industri, komunikasi dan informasi, yang mendorong peningkatan luar biasa kapasitas dan produktivitas industri dan pertanian, kemudahan proses produksi dan jasa-jasa, kelancaran transportasi, transaksi perdagangan dan keuangan, tercipta pasar bebas dan pembebasan tarif barang dalam perdagangan dunia. Globalisasi mendorong tumbuh dan berkembang berbagai tuntutan publik akan pentingnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, serta hormat kepada hak-hak azasi manusia (HAM) dan pelestarian lingkungan. Tuntutan publik mengglobal, menyebabkan para penyelenggara negara-bangsa harus bekerja keras, ekstra disiplin, dan mampu merespons perubahan zaman demi menjaga integritas kedaulatan negara-bangsa yang bersangkutan.

Akibat globalisasi terjadi *borderless* antar negara bangsa melampaui yurisdiksi kedaulatan negara bangsa. Martin & Schumann (2005 : 276-310), menilai dunia kini terperangkap jebakan global, dalam mana terjadi serangan terhadap demokrasi dan kesejahteraan, menyebabkan keruntuhan politik dan masa depan kedaulatan nasional semua *nation-state*. Praktis tidak ada

negara bangsa yang mampu lolos, menghindar globalisasi, melainkan nasib *nation state* selalu dipengaruhi berbagai faktor dan aktor globalisasi, seperti oleh lembaga multilateral, misal *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia, *Multi-National Corporations* (MNC), *Non-Government Organization* (NGO) serta individu aktor intelektual seperti George Soros. Namun tetap penting adanya *nation state*, diantaranya agar jelas status individu manusia sebagai penduduk sebuah negara. Dengan demikian *nation states* tetap berdaulat karena punya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang pasti memiliki otoritas mengelola negara bangsa. Indonesia sebagai *nation state* tetap terbuka peluang hidup normal dalam gelombang globalisasi terutama dengan kuatnya ketahanan nasional.

Ada sejumlah negara masuk katagori negara gagal, terutama di Afrika *hopeless and helpless*. Juga di Asia, Amerika Latin dan samudera Pasifik. Sejumlah negara Asia sangat mungkin menjadi negara gagal pada paruh pertama milenium ke-3 ini akibat terjadinya sejumlah perubahan (Backman, 200). Negara-negara gagal, menurut Rotberg (Siradjudin, 2009), terutama karena tidak mampu menyejahterakan rakyat, gagal melaksanakan pembangunan, di anta-

ranya karena diterpa pemberontakan, kudeta, konflik dan gangguan keamanan yang berkepanjangan, juga karena bertubi-tubi dihantam bencana alam. Hal itu menerpa Somalia, Ethiopia, Chad, Rwanda, Burundi, negara-negara Sahara Afrika, juga Srilangka, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Laos dan Kampuchea, bahkan Philipina, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. NKRI sempat dimasukkan dalam kategori negara gagal pada paroh pertama era Reformasi, tahun 1998-2003. Hal itu terutama akibat Indonesia dinilai gagal menyejahterakan rakyat yang mayoritas hingga kini setelah merdeka lebih 64 tahun ternyata tetap miskin dan terkebelakang (Ibid, Sirajuddin).

Uni Soviet Sosialis Republik (USSR) sebuah negara raksasa *plurally* komunis hancur setelah berdiri 76 tahun pada tahun 1993. Lesmana (1992) mencatat Uni Soviet bubar akibat banyak masalah, antara lain faktor dominan Rusia dalam negara USSR, Presiden Gorbachev salah menerapkan *Prestroyka* dan *Glasnost*, terjadi rivalitas kepemimpinan Gorbachev-Yeltsin, dan kegagalan pembangunan. Juga karena rakyat yang mayoritas miskin lelah hidup dalam sistem komunis yang otoriter selama lebih 70 tahun, menyebabkan

merosotnya nasionalisme dan *national pride* menyebabkan tumbuhnya nasionalisme baru di negara-negara bagian. Buruknya nasib rakyat akibat pers dikendalikan, mirip rakyat Indonesia yang akhirnya meledak *euphoria* pada awal era Reformasi. Yugoslavia hancur antara lain karena wafatnya Presiden Tito, pemimpin kharismatik yang menyatukan negara balkan itu. Cekoslovakia bubar karena persoalan etnik, Ceko dan Slovakia memisahkan diri menjadi dua negara bangsa.

Hingga kini belum ada bukti kehancuran negara akibat kebebasan pers. Yang ada, negara hancur (*collapsed state*) karena faktor non-pers. Khaldun (2003: 371) menyebut hancurnya negara karena lemahnya kekuatan (militer) dan rontoknya solidaritas sosial, serta merosotnya dana sehingga tidak mampu membiayai negara.

Ada beberapa sebab negara lemah, gagal dan hancur, antara lain lantaran konstitusi bermasalah, rapuh dan tidak ditaati rakyat; lemah peran strategis ideologi nasional; hilang atau merosotnya *national pride*, tidak ada perekat integrasi nasional terutama akibat lemahnya solidaritas sosial; krisis kepemimpinan; krisis multidimensi yang berkepanjangan; serta rakyat kelaparan, sengsara dan diterpa

wabah penyakit. Juga karena pemerintah tidak amanah, lupa pada rakyat dan berlaku zalim; korupsi merajalela; lemah disiplin, moral dan karakter nasional; serta rapuh pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman *state security* dan *human security*, termasuk lalai menghadapi bahaya infiltrasi, subversi, intervensi, invasi dan agresi dari negara lain. Negara runtuh juga akibat *collapsed democracy* termasuk karena kuatnya feodalisme dan otoritarianisme; meletus berbagai konflik horizontal dan vertikal (agama dan etnis); ditimpa bencana alam, terutama terjadi pada negara-negara kuno. Negara gagal atau bubar juga akibat rendah partisipasi rakyat; tidak terbangun rasa saling cinta antara rakyat dan pemimpin; gagal pemberdayaan dan penguatan pemerintah; terperangkap utang luar negeri; lemah ikatan sosial budaya akibat kuatnya etnisitas dan tak dihormatinya multi-kulturalisme; serta lemahnya penegakan hukum, tak ada keadilan, dan terjadi *lawless*. Selain itu karena buruknya komunikasi politik dan sosial antar-elit pemimpin, rakyat, pemerintah, dan hubungan antara pusat-daerah; buruknya manajemen negara; terjadi pembangkangan daerah-daerah baik pemerintah lokal maupun rakyat; terpuruk-

nya kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan; berkembang kesadaran baru nasionalisme dan patriotisme ke-daerahan (primordialisme sempit); lemahnya budaya demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan penghormatan atas HAM; tak ada kebebasan pers; tumbuh subur sikap saling curiga. Faktor terbesar negara gagal dan runtuh karena kegagalan kepemimpinan (*leadership*), terutama karena elit pemimpin hidup mewah, menjadi sangat feodal, dan lemahnya *sense of crisis* atas nasib rakyat yang mayoritas menderita, miskin dan terkebelakang.

Ketahanan nasional Indonesia hingga kini masih rapuh. Patut disimak catatan Ma'arif (Indrayana, 2008) sbb:

"Uang menjadi yang maha kuasa, seolah-olah menjadi segala-galanya. Pernyataan itu menyampaikan pesan betapa dalam kerusakan moral bangsa ini. Sangat sukar bagi kita berharap ada perubahan lebih baik meski reformasi yang melahirkan demokrasi telah berlangsung hampir satu dasa warsa. Sepuluh tahun sudah bangsa Indonesia hidup dalam masa transisi demokrasi. Perlahan namun pasti angin reformasi malah berbalik arah. Bukan perbaikan yang kita temukan, tapi ketambah-bobrokan semakin melilit di hampir segala sendi kehidupan. Hasrat untuk melihat Indonesia Baru menjadi mimpi siang bolong. Bangsa Indonesia terus saja bergulat dengan aneka problem makin kompleks dan krusial serta terjebak dalam labirin kudesak

yang mematikan. Kesenjangan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan keagamaan semakin tajam. Keadilan terasa semakin jauh”

Dalam beberapa aspek lemahnya ketahanan nasional yang patut diwaspadai. Diantaranya, posisi Indonesia strategis sekaligus rawan sebagai negara kepulauan terbesar dunia yang wilayahnya terbuka bagi lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional. Wahyono (2009 : 45) mengingatkan, dalam menjamin kedaulatan nasional harus diperhatikan kuatnya kesadaran ruang negara dan kesadaran batas negara. NKRI terdiri 17.508 pulau, luas daratan lebih 6 juta km², berpenduduk lebih 230 juta (2009), dihuni lebih 400 suku bangsa yang terikat erat oleh *lingua franca* yakni Bahasa Indonesia. Selain itu berkali-kali diterpa situasi kritis, seperti harus melawan Belanda tahun 1945-1949, merebak berbagai pemberontakan, gerakan separatis, krisis konstitusi 1958-1960, dan lepasnya Timor Timur.

Bukan akibat kebebasan pers, jika dibiarkan berlarut bisa menjadi ancaman ketahanan nasional, mengancam NKRI dan mendorong disintegrasi, dan membuat NKRI negara gagal/bubar. Pertama, geopolitik seharusnya menguntungkan tapi juga berbahaya. Kedua, sumber daya alam (SDA) kaya raya,

mayoritas rakyat miskin dan terkebelakang. Ketiga, problem demografi, penduduk terbesar keempat setelah RRC, India, dan AS, belum menjadi kekuatan sebagai elemen *national power*, karena mutu sumber daya manusia (SDM) rendah. Rakyat masih menjadi beban pembangunan, belum menjadi kekuatan negara. Tahun 2025 dan 2050 masing-masing akan lebih 275 juta dan 350 juta jiwa. Keempat, gamang ideologi nasional, Pancasila, Liberalisme, atau apa? Kelima, masalah konstitusi dan sistem pemerintahan dan masih kuatnya feodalisme menghadang demokrasi.

Keenam, negara sudah lama merdeka, tapi masih banyak rakyat hidup melarat. Kini negara dibebani besarnya hutang luar negeri, merajalela korupsi, elit pemimpin banyak yang tak amanah dan tak pro-rakyat. Ketujuh, masalah sosial budaya, lemah penegakan hukum, rendah mutu pendidikan, kesehatan, gizi dan sanitasi, merebak konflik sosial, problem etnisitas dan multikulturalisme. Kedelapan, sangat lemah kekuatan hankam. Kesembilan, teknologi tertinggal jauh dari negara-negara maju.

Namun Indonesia kini memiliki lingkungan strategis yang kondusif, karena tidak ada negara yang menjadi musuh dan me-

musuhi NKRI. Hal itu merupakan peluang dalam perspektif Indonesia membangun dan memperkuat ketahanan nasional (Yudhoyono, 2009). Namun hancurnya sejumlah negara tentu pelajaran penting bagi Indonesia. Majalah *Foreign Policy* dan *The Fund For Peace* sempat memasukkan NKRI dalam katagori 60 negara gagal tahun 2007 (Siradjuddin, 2009). Rotberg dalam *The Nature of Nation State Failure 2002* (Ibid: 7) menemukan Indonesia terancam menjadi negara gagal (*Failed State*), malahan bisa tererosok menjadi negara runtuh, hancur atau bubar (*Collapsed State*).

Diyakini kuatnya budaya demokrasi, adanya pers bebas dan profesional akan otomatis membangun sikap tanggungjawab dan semangat partisipasi rakyat dalam membangun *nation state*. Pers bebas mampu merekam kehidupan riil negara dan rakyat ditemui di negara-negara maju, kaya dan makmur. Pers merdeka akan mendorong sikap saling mencintai antara rakyat dan pemimpin. Sebaliknya di negara-negara otoriter, pers tidak mampu merekam persoalan riil rakyat dan negara, sehingga pers tidak dapat berprakarsa, inovasi dan advokasi atas masyarakat, lantaran selalu terancam kekuasaan otoriter. Dalam negara yang tidak demokratis, pers

tidak mampu melaksanakan *early warning system*, sehingga jika terjadi bencana karena kebijakan pemerintah yang keliru akan selalu secara tiba-tiba, mengejutkan dan menimbulkan kepanikan. Dalam negara demokratis, segala perkembangan dapat diikuti sejak awal oleh publik karena adanya transparansi sehingga segala sesuatu yang terjadi dan menyangkut harkat kehidupan orang banyak dapat diantisipasi jauh hari sebelumnya.

Untuk menjawab berbagai tantangan dan ancaman itu perlu solusi dinamis, di antaranya perkuat ideologi dan konstitusi, benahi demokrasi dan kesejahteraan, kuatkan semangat kebhinnekaan dan multikulturalisme, ganyang feodalisme dan korupsi, bangun *leadership* dan *national pride* prima, cegah ketidakadilan, atasi beban utang luar negeri, bangkitkan nasionalisme dan sikap smart menghadapi tantangan.

Konvergensi Pers dan Ketahanan Nasional

Sulit memprediksi kebebasan pers di Indonesia, karena tergantung sikap penguasa. Komitmen konstitusi boleh saja menjamin pers merdeka, penerapannya tergantung sikap penguasa (Az-zam, 2003). Namun jika NKRI mampu menjawab tantangan globalisasi, pasti akan menjadi

negara kuat dan makmur, mampu mengantisipasi tidak menjadi negara gagal, dan pers harus proaktif mengabdikan negara bangsa. Untuk Indonesia maju, adanya kebebasan pers merupakan suatu keharusan. Karena itu sejalan dengan pembenahan demokrasi, maka pers juga harus menemukan format tepat bagi Indonesia. Untuk memperkuat ketahanan nasional, pers harus profesional, independen dan idealis sebagai nasionalis dan patriotis.

Terbukti, lemahnya negara, lemah pula pers dengan nasib tidak terlindungi, sehingga terjadi lingkaran setan semakin terpuruk nasib negara bangsa itu. Sebaliknya di negara yang sistem kenegaraannya kuat, maju dan makmur, pasti pers kuat, maju, sehat dan makmur. Hal itu menunjukkan eratnya korelasi pers dengan negara bangsa, masyarakat, dan ketahanan nasional. Konvergensi pers dan ketahanan nasional adalah keniscayaan memperkuat negara bangsa. Dalam negara yang hormat pada kebebasan pers, ada harmonisasi dan hubungan yang indah dan saling memperkuat antara pemimpin dan rakyat, serta antara pemerintah dan warga negara.

Untuk memenuhi situasi tersebut perlu dibangun sistem pers nasional yang tepat untuk Indo-

nesia, yang pro-rakyat. Pers nasional itu berlandaskan ideologi nasional Pancasila, berakar pada tradisi dan nilai-nilai nasional, memperkuat integritas nasional dengan kuatnya solidaritas sosial, senantiasa memerangi ketidak-adilan dan korupsi. Pers itu tidak menghambakan diri pada kekuasaan pemerintah, melainkan bersikap loyal yang rasional dan kritis demi memajukan Indonesia. Sistem pers demikian menghormati supremasi hukum, taat etika profesi, dan norma-norma masyarakat, berwawasan nasional dan sesuai prinsip universal kebebasan pers, hormat pada hak-hak azasi manusia (HAM), menjaga lingkungan hidup dan humanisme. Pers yang diperlukan adalah yang bersikap independen, netral, idealis, dan profesional berlandaskan semangat nasionalisme dan patriotisme. Diyakini, sistem pers demikian akan memperkuat ketahanan nasional.

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul, 2008, *Mengelola Kebebasan Pers*, Dewan Pers, Cet-I, Jakarta
- Anwar, H. Rosihan, 2006, *Wartawan, Engkau Pahlawan Dalam Hatiku, Orasi, Menerima Anugerah Doctor Honoris Causa Dalam Bidang Jurnalistik dan Komunikasi*, Universitas Islam Negeri

- (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Basuki, Wishnu, 1995, *Pers dan Penguasa (Pembocoran Pentagon Papers dan Pengungkapan oleh New York Times)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Business News, 2009, *Freedom of the Press*, Ed-7851, 26 Agustus 2009, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Cetakan ke-2, September 2008, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Kompas, 10 Oktober 1998.
- Lemhannas RI, 2003, *Ketahanan Nasional Indonesia*, Kajian Kelompok Kerja Geo-Strategi & Ketahanan Nasional, Jakarta.
- Lesmana, Tjipta, 1992, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, Edwin-Rika Press, Jakarta
- Malik, Dedy Djamaluddin; Rakhmat, Jalaluddin & Shoelhi, Mohammad, 1993, *"Komunikasi Internasional"*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald, 2005, *Jebakan Global (Serangan Terhadap Demokrasi dan Kesejahteraan, Hasta Mitra & Institute for Global Justice, Jakarta. Original: Die Globalisierungsfalle, Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand*, Rowohlt 1996, Wien, Austria.
- Siradjuddin, Effendi, 2009, *Memerangi Sindrom Negara Gagal (Transformasi Indonesia 2020 Mencapai Negara Entrepreneur Maju)*, PT Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Wahyono SK, 2009, *Indonesia Negara Maritim*, Penerbit Te-
raju, Cilandak, Jakarta.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, 2009, *Pidato HUT-64 Kemerdekaan RI*, *Business News* 7848, hal. 17, 19 Agustus 2009, Jakarta.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, 2009, *Indonesia Melangkah Maju*, dalam *Kompas*, Rabu - 21 Oktober 2009, hal.1, Jakarta.